

**MASALAH APARTHEID DIKAITKAN DENGAN
THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 1948**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

MERRY ROESPITA TATALEDE

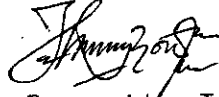
NRP 2860122

NIRM 86.7.004.12001.44878

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
1991**

Surabaya,

Mahasiswa yang bersangkutan



Merry Roespita Tatalede

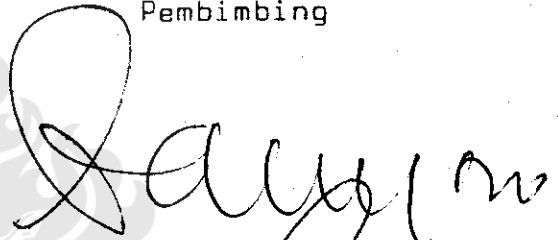
Mengetahui

Dekan

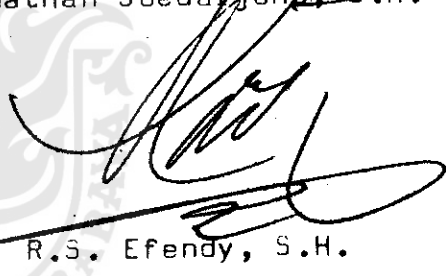


Daniel Djoko Tarliman, S.H.

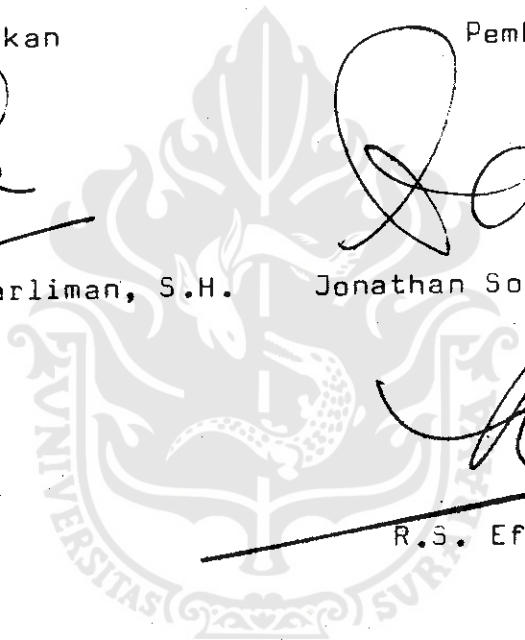
Pembimbing



Jonathan Soedarjono, S.H.



R.S. Efendy, S.H.



Dengan meningkatnya kemakmuran kehidupan materiil dan makin cepatnya penerapan teknologi modern, manusia ternyata bukan makin bahagia, tetapi justru mengalami kemunduran-kemunduran terutama dalam masalah hak asasi manusia. Salah satu contoh masalah hak asasi manusia yang menarik, adalah masalah apartheid yang merupakan satu kebijaksanaan politik dari rezim yang berkuasa sekarang di Afrika Selatan, di mana kebijaksanaan apartheid ini dengan nyata dan jelas bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, karena politik ini membedakan hak-hak dan kewajiban yang berbeda antara penduduk mayoritas Afrika Selatan yang berkulit hitam dan penduduk minoritas Afrika Selatan yang berkulit putih (Afrikaner). Adapun perbedaan-perbedaan ini melingkupi bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya misalnya: dalam masalah tempat tinggal penduduk kulit hitam hidup di pinggiran kota sebaliknya penduduk kulit putih dapat hidup nyaman di pusat-pusat kota dengan segala fasilitas yang memadai, dalam masalah pendidikan penduduk kulit putih lebih tinggi bila dibandingkan dengan pendidikan penduduk kulit hitam, dalam masalah mata pencaharian penduduk kulit hitam terbatas kesempatan kerjanya bila dibandingkan dengan penduduk kulit putih. Begitu juga dalam menggunakan fasilitas-fasilitas umum antara penduduk kulit hitam dibedakan sekali dengan penduduk kulit putih, di mana fasilitas

umum untuk penduduk kulit putih khusus untuk kulit putih saja. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya, yang dapat dijumpai di Afrika Selatan sebagai pelanggaran akan hak-hak asasi manusia yang dilakukan rezim Pretoria yang memerintah sekarang. Atas dasar itulah, saya membuat skripsi dengan judul "Masalah Apartheid Dikaitkan Dengan The Universal Declaration of Human Rights 1948".

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memperdalam ilmu hukum khususnya di bidang hak asasi manusia sekaligus untuk mendapatkan kebenaran ilmiah dengan membandingkan antara teori dan praktek.

Untuk mencapai tujuan dalam penulisan ini digunakan metoda kualitatif yaitu analisa data yang dilakukan dengan mendalami materi yang dibahas tanpa menggunakan angka-angka statistik dan pembahasannya disajikan secara deskriptif atau memberikan gambaran. Oleh karena itu data yang digunakan dalam skripsi ini berupa data sekunder yang diperoleh dari literatur, catatan kuliah, majalah, dan sebagai pelengkap menggunakan data dengan mencari informasi kepada perwakilan PBB serta perwakilan dari negara asing di Jakarta. Setelah data dikumpulkan, maka pengolahan data dilakukan dengan cara deduksi sesuai masalah yang dikaji. Sedangkan pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melihat norma-norma hukum positif, perundang-undangan serta te-

bri-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Jadwal waktu penelitian yang digunakan untuk mencari data dibagi dalam beberapa fase yaitu :

- Fase pengumpulan data : 1 September - 30 September 1991
- Fase pengolahan data : 1 Oktober - 31 Oktober 1991
- Fase analisis data : 1 November - 1 Januari 1992

Pokok hasil penelitian yang diperoleh, bahwa politik apartheid adalah politik perbedaan warna kulit yang dilaksanakan oleh rezim kulit putih yang berkuasa di Afrika Selatan sejak tahun 1948, dan politik ini secara jelas bertentangan dengan hak asasi manusia dan Piagam PBB.

Obyek penelitian yang menunjang penyusunan skripsi ini adalah The Universal Declaration of Human Rights 1948 dikaitkan dengan masalah apartheid.

Akhirnya kesimpulan yang dapat diambil bahwa banyak negara menentang dengan keras politik apartheid ini dan menyerukan kepada badan dunia untuk mengutuk serta menghukum rezim yang berkuasa di Afrika Selatan.